



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah Telepon:
(024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 884 27 November 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati Banyumas

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 100.3.2/X/2025, Nomor 100.3.2/29/X/2025, Nomor P/379/100.3.2/XI/2025, Nomor 100.3.2/4314/X/2025, Nomor P/379/100.3.2/XI/2025, Nomor 900/1415/X/2025, Nomor S/401/100.3.2/XI/2025, Nomor P/350/100.3.0/X/2025, Nomor P/412/100.3.2/XI/2025, Nomor P/379/100.3.2/XI/2025, Nomor P/350/100.3.2/X/2025, Nomor 000.7.2.3/212/IX/2025, Nomor S/401/100.3.2/XI/2025, Nomor P/412/100.3.2/XI/2025, Nomor 100.3.2/26/X/2025, Nomor 100.3.2/4487/X/2025, P/412/100.3.2/XI/2025, Nomor S/334/100.3.2/X/2025, Nomor 100.3.2/4487/X/2025, Nomor 100.3.2/21/X/2025, Nomor 100.3.2/27/X/2025, Nomor 100.3.2/18/X/2025, 100.3.2/28/2-25, dan Nomor P/379/100.3.2/XI/2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2026;
2. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
3. Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan;
5. Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025;
7. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya
8. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025;
10. Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
14. Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025;
15. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
16. Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
17. Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Di

Desa;

19. Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
20. Peraturan Daerah tentang Fasilitas Asuransi Pertanian;
21. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
22. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
24. Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.